

## EVALUASI DAMPAK PROGRAM RUMAH SINGGAH DALAM PENANGGULANGAN PENGEMIS, GELANDANGAN, DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) DI KABUPATEN BANYUMAS

Alfriansa Agustina<sup>1\*</sup>, Oti Kusumaningsih<sup>2</sup>, Anggara Setya Saputra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

\*Korespondensi : [alfriansaagustina0@gmail.com](mailto:alfriansaagustina0@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini membahas evaluasi dampak Program Rumah Singgah di Kabupaten Banyumas yang dirancang untuk mengatasi masalah Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DINSOSPERMASDES), Satpol PP, pengelola rumah singgah, masyarakat, dan penghuni rumah singgah. Evaluasi mengacu pada kriteria Finterbusch dan Motz, yang meliputi dampak terhadap individu, masyarakat, organisasi, kelompok, lembaga, dan sistem sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rumah singgah berkontribusi positif dalam perubahan perilaku PGOT, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas fasilitas, kurangnya penerimaan dari keluarga penghuni, serta belum maksimalnya program pelatihan keterampilan. Dari sisi dampak sosial, program ini diterima cukup baik oleh masyarakat yang turut mendukung melalui sumbangan kebutuhan pokok dan kegiatan amal. Dari sisi organisasi dan kelompok, kerjasama antar lembaga terkait seperti DINSOSPERMASDES, Satpol PP, dan relawan sudah berjalan cukup efektif, meskipun diperlukan penguatan koordinasi dan penambahan kapasitas rumah singgah. Pada tingkat sistem sosial, program ini berkontribusi dalam mendorong perubahan kebijakan lokal melalui peningkatan anggaran dan evaluasi rutin, namun proses reintegrasi PGOT ke keluarga dan masyarakat masih menjadi tantangan. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas fasilitas, penguatan pelatihan keterampilan yang lebih aplikatif, serta sinergi pemerintah dan swasta untuk menjamin keberlanjutan program di masa depan.

**Kata Kunci :** Evaluasi, PGOT, Program Rumah Singgah.

### ABSTRACT

*This article examines the impact evaluation of the Temporary Shelter Program (Rumah Singgah) in Banyumas Regency, which is designed to address issues related to beggars, homeless individuals, and neglected persons. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The informants consisted of representatives from the Social Affairs and Community Empowerment Office (DINSOSPERMASDES), the Civil Service Police Unit (Satpol PP), shelter management officers, community members, and shelter residents. The evaluation refers to the criteria proposed by Finsterbusch and Motz, covering impacts on*

*individuals, communities, organizations, groups, institutions, and the social system. The findings indicate that the program has contributed positively to behavioral change among PGOT, although it still encounters challenges such as limited facility capacity, a lack of family acceptance, and insufficiently effective skills training programs. In terms of social impact, the program has gained considerable support from the community, particularly through charitable activities and the provision of basic needs. Regarding organizational and group impacts, collaboration among related institutions such as DINSOSPERMASDES, Satpol PP, and volunteers has been fairly effective, although stronger coordination and increased shelter capacity remain necessary. At the social system level, the program has encouraged local policy improvements through increased budgeting and routine evaluations. However, the reintegration of PGOT into their families and society continues to be a significant challenge. As a recommendation, this study highlights the importance of improving facility capacity, strengthening more applicable skills training, and fostering stronger partnerships between government and private sectors to ensure the sustainability of the program in the future.*

**Keywords :** *Homeless Individuals; Program Evaluation; Social Rehabilitation; Temporary Shelter.*

## A. PENDAHULUAN

PGOT di Indonesia bukan hanya persoalan kemiskinan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap perumahan layak dan pekerjaan yang stabil. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menyediakan infrastruktur yang memadai bagi kelompok rentan ini, terutama dalam konteks perekonomian yang dinamis dan ketimpangan distribusi sumber daya (Mustaqim & Rahmatullah, 2023). Dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di berbagai wilayah, banyak individu terpaksa mencari penghidupan di jalanan, yang menambah angka PGOT di perkotaan (Amir et al., 2020). Menurut data Kementerian Sosial Indonesia, populasi PGOT meningkat sekitar 5-10% setiap tahun, terutama selama periode pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian nasional (Kemendagri, 2022). Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal mereka, menyebabkan gelombang PGOT baru, terutama di wilayah metropolitan (Pratiwi, 2023). Fenomena ini menunjukkan

perlunya perencanaan dan implementasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk menanggulangi masalah PGOT di Indonesia. Berdasarkan studi yang dilakukan di beberapa negara berkembang, salah satu faktor penyebab utama PGOT adalah keterbatasan akses ke layanan kesehatan mental dan pendidikan yang memadai (Zhou et al., 2020). Situasi ini juga berlaku di Indonesia, di mana dukungan untuk kesehatan mental dan program rehabilitasi bagi PGOT masih sangat minim (Rahman & Sari, 2023). Keterbatasan tersebut menyebabkan mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketidakmampuan memperoleh pekerjaan. Tabel berikut menunjukkan data tentang pertumbuhan populasi PGOT di beberapa kota besar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 1.1 Data populasi PGOT di beberapa kabupaten di Indonesia Tahun 2019-2023

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Banyumas	3.480	3.700	3.950	4.070	4.250
Sleman	2.500	2.650	2.700	2.750	2.800

Surabaya	6.300	6.450	6.500	6.600	6.700
Bandung	5.200	5.350	5.400	5.450	5.500
Malang	4.100	4.200	4.300	4.350	4.400
Medan	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200

Sumber : Kemensos RI, 2023

Berdasarkan data tabel diatas, data populasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di beberapa kabupaten di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, dengan variasi jumlah yang signifikan di setiap wilayah. Kabupaten Banyumas, misalnya, mengalami kenaikan dari 1.234 orang pada tahun 2019 menjadi 1.800 orang pada tahun 2023, sementara kabupaten lain seperti Malang dan Klaten juga menunjukkan pola serupa.

Urbanisasi yang pesat di kota-kota kecil seperti Purwokerto sering kali menyebabkan meningkatnya populasi pendatang yang berharap mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik (Stephens & Ruddick, 2022). Namun, ketika kesempatan kerja dan layanan sosial tidak mampu mengimbangi kedatangan ini, banyak dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap atau penghasilan yang memadai, sehingga terjebak dalam kondisi keterlantaran (DeVerteuil, 2019). Di Purwokerto, data lokal menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah pengemis dan gelandangan sejak 2018, terutama di area-area pusat kota dan sekitar kampus kampus besar (World Bank, 2020).

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berupaya untuk mengatasi masalah PGOT melalui berbagai program, termasuk bantuan sosial, pelatihan kerja, dan penyediaan tempat penampungan sementara (Kusno & Asri, 2021). Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait,

sehingga program tersebut belum efektif dalam menangani masalah PGOT secara menyeluruh (Munro et al., 2023). Selain itu, stigma sosial yang melekat pada PGOT memperparah kesulitan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat (Tarsilla & Lundberg, 2020).

Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan peningkatan populasi PGOT Kabupaten Banyumas dari tahun 2018 hingga 2023.

Tabel 1.2 Data populasi PGOT di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Pengemis	Jumlah Gelandangan	Jumlah Orang Terlantar	Total PGOT
2019	1.300	980	1.200	3.480
2020	1.400	1.050	1.250	3.700
2021	1.500	1.100	1.350	3.950
2022	1.550	1.120	1.400	4.070
2023	1.600	1.200	1.450	4.250

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Banyumas (2023).

Kesimpulan dari data tabel populasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas tahun 2018–2023 menunjukkan adanya fluktuasi jumlah PGOT setiap tahunnya. Secara keseluruhan, data memperlihatkan tren peningkatan populasi PGOT di beberapa tahun terakhir, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan urbanisasi, kesulitan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap program bantuan sosial. Meski program penanggulangan telah diterapkan, jumlah PGOT yang relatif tinggi mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas intervensi sosial, seperti optimalisasi program Rumah Singgah dan pemberdayaan ekonomi, agar bisa memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi jumlah PGOT di Kabupaten Banyumas.

Program Rumah Singgah merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan masalah sosial, terutama bagi pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas. Rumah Singgah menyediakan tempat sementara yang aman dan layak bagi individu-individu yang kehilangan tempat tinggal atau tidak memiliki dukungan sosial yang memadai (Jones & Smith, 2021). Sebagai jembatan antara jalanan dan perumahan permanen, Rumah Singgah di Kabupaten Banyumas juga berfungsi sebagai tempat pemulihan sementara, di mana penghuni dapat mendapatkan akses ke layanan dasar seperti makanan, air, dan fasilitas kebersihan (Munro & Thompson, 2023).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi dampak program Rumah Singgah dalam penanggulangan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling untuk pihak terkait seperti Kepala Dinas Sosial, Kepala Satpol PP, Pengelola Rumah Singgah, serta penghuni rumah singgah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara dengan informan kunci dan observasi di lokasi, serta data sekunder dari dokumen, laporan, dan literatur pendukung. Fokus kajian penelitian mencakup dampak program pada individu, masyarakat, organisasi, hingga sistem sosial, yang meliputi perubahan perilaku, kesejahteraan, keterampilan, penerimaan sosial, efektivitas program, dan keberlanjutan kebijakan. Analisis data

dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori, untuk memastikan keakuratan dan kepercayaan data yang diperoleh dari berbagai perspektif dan teknik pengumpulan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Rumah Singgah Kabupaten Banyumas dilaksanakan dan dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang dikepalai oleh Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitas Sosial secara lebih khusus dikepalai oleh Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial dengan dibantu oleh para petugas Rumah Singgah tersebut. Pada penelitian ini digunakan 4 kriteria evaluasi untuk mengevaluasi Program Rumah Singgah Kabupaten Banyumas. Kriteria-kriteria tersebut merupakan kriteria evaluasi menurut Finnsterbusch dan Motz, menurutnya evaluasi ini adalah evaluasi yang menekankan pada pengukuran hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu program atau kebijakan, khususnya dampak jangka panjang pada masyarakat atau kelompok sasaran, dan kriteria evaluasi ini digunakan karena relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **1. Dampak Individu**

Perubahan perilaku penghuni Rumah Singgah di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren positif yang dapat diamati melalui meningkatnya kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan berinteraksi sosial secara lebih baik. Program yang diimplementasikan

tidak hanya memberikan pengaruh pada ranah individu, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap keberhasilan lembaga dalam mengelola intervensi sosial. Selain itu, keberadaan Rumah Singgah berdampak pada kelompok atau organisasi pengelola yang kini memiliki pengalaman dan kapasitas lebih baik dalam menangani PGOT. Secara lebih luas, masyarakat Kabupaten Banyumas turut merasakan manfaat dari penurunan gangguan ketertiban umum di ruang publik. Dengan demikian, perubahan perilaku yang terjadi tidak hanya mengarah pada transformasi individu, tetapi juga membantu pemerintah dalam mengurangi berbagai permasalahan sosial terkait pengemis, gelandangan, dan orang terlantar.

Dalam aspek kesejahteraan fisik dan psikologis, pelaksanaan program di Rumah Singgah Kabupaten Banyumas juga memperlihatkan hasil yang cukup baik. Penghuni memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, serta pelayanan kesehatan dasar yang membantu perbaikan kondisi fisik mereka. Dari sisi psikologis, pendampingan yang diberikan turut membantu membangun pola pikir dan kondisi emosional penghuni menjadi lebih stabil, sehingga motivasi untuk meninggalkan kehidupan jalanan semakin kuat. Namun, implementasi aspek ini dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat sejumlah hambatan, seperti keterbatasan tenaga pendamping profesional di bidang psikologi dan pelayanan kesehatan mental yang berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan beberapa penghuni belum dapat mencapai perkembangan optimal sesuai kebutuhan individual masing-masing.

Sementara itu, pada aspek

pengembangan keterampilan, pelaksanaannya dinilai belum memberikan hasil yang memadai. Pelatihan yang diselenggarakan masih bersifat sporadis serta belum disesuaikan dengan minat dan kapasitas penghuni, sehingga belum mampu mendorong mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi setelah kembali ke masyarakat. Ketidakefektifan tersebut menunjukkan bahwa program belum berhasil menciptakan solusi pemberdayaan yang efektif bagi individu. Hambatan yang muncul antara lain lemahnya kemitraan dengan dunia usaha, kurangnya instruktur pelatihan yang kompeten, serta belum adanya kurikulum keterampilan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, potensi penghuni untuk bertransformasi menjadi individu yang mandiri secara ekonomi belum dapat terealisasi secara optimal.

## **2. Dampak Masyarakat**

Penerimaan sosial terhadap Program Rumah Singgah di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Kehadiran program ini tidak hanya mengurangi keberadaan PGOT di ruang publik, tetapi juga meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kelompok rentan yang selama ini sering terpinggirkan. Masyarakat mulai memahami bahwa para penerima manfaat merupakan individu yang membutuhkan dukungan, bukan sekadar dianggap sebagai pengganggu ketertiban umum. Perubahan cara pandang tersebut mendorong tumbuhnya empati dan rasa tanggung jawab kolektif dalam menciptakan ruang hidup yang lebih manusiawi. Secara tidak langsung, program ini membentuk pola pikir bahwa setiap manusia tanpa terkecuali dimana memiliki hak untuk diperlakukan secara bermartabat dan memperoleh



kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, keberhasilan Rumah Singgah tidak hanya terukur dari aspek pelayanan sosial, tetapi juga dari kontribusinya dalam memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas dalam masyarakat Kabupaten Banyumas.

### **3. Dampak Organisasi dan Kelompok**

Pencapaian target Program Rumah Singgah di Kabupaten Banyumas dapat dikategorikan efektif karena pelaksanaan program ini mampu memberikan manfaat nyata bagi lembaga pelaksana maupun pihak yang terdampak langsung. Kapasitas organisasi dalam menjalankan program juga dinilai memadai, terlihat dari kemampuan Rumah Singgah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni mengurangi dan menangani keberadaan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar sebagai bagian dari upaya mengentaskan penyakit masyarakat di Kabupaten Banyumas. Selain itu, masyarakat maupun penerima manfaat menunjukkan respons positif yang tercermin dari tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan yang diberikan, meskipun cakupan program belum dapat menjangkau seluruh wilayah atau seluruh kelompok sasaran secara merata. Program ini juga telah menunjukkan arah keberlanjutan yang baik, ditandai dengan adanya solusi penguatan program yang telah direncanakan dan disetujui oleh para pemangku kebijakan sehingga Rumah Singgah dapat terus memberikan kontribusi dalam jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Banyumas.

### **4. Dampak Lembaga dan Sistem Sosial**

Perubahan pada kebijakan lokal

terkait penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas masih belum terlaksana secara optimal, terlihat dari masih ditemukannya individu PGOT yang sulit diidentifikasi asal-usulnya maupun riwayat sosialnya sehingga menyulitkan proses penanganan dan reintegrasi ke lingkungan yang tepat. Di sisi lain, dukungan lintas lembaga dalam Program Rumah Singgah telah menunjukkan kinerja yang baik melalui koordinasi aktif antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan pengelola Rumah Singgah dalam mengatasi berbagai hambatan di lapangan dengan pendekatan solusi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika permasalahan yang muncul. Selain itu, keberlanjutan sistem sosial dalam pengelolaan Rumah Singgah juga dinilai cukup efektif terutama dalam penyediaan layanan yang mampu mempercepat proses penurunan angka PGOT di ruang publik, menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi dan perlindungan sosial yang dijalankan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ketertiban dan kesejahteraan sosial masyarakat Banyumas secara keseluruhan.

### **D. KESIMPULAN**

Evaluasi terhadap Program Rumah Singgah dalam penanggulangan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Program ini berhasil memenuhi layanan dasar seperti tempat tinggal sementara, kebutuhan fisik, serta pendampingan sosial yang membantu menurunkan jumlah PGOT yang berkeliaran di ruang publik. Selain itu, koordinasi antarinstansi seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan pengelola Rumah

Singgah telah berjalan secara fungsional dalam mendukung proses penjangkauan serta pengelolaan kasus.

Namun demikian, efektivitas program belum mencapai titik optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya penghuni yang sulit ditelusuri asal-usul dan kondisi keluarganya sehingga proses reintegrasi sosial tidak dapat dilakukan secara cepat. Aspek pemberdayaan ekonomi dan psikososial juga masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi kompetensi pendamping maupun ketersediaan fasilitas peningkatan keterampilan yang berkelanjutan. Selain itu, keberlanjutan program masih sepenuhnya bertumpu pada pendanaan pemerintah daerah, sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan dan alokasi anggaran.

Oleh karena itu, agar tujuan rehabilitatif dan pemberdayaan dapat tercapai secara lebih komprehensif, diperlukan langkah-langkah penguatan strategi, antara lain: pemutakhiran sistem basis data untuk mengoptimalkan penelusuran keluarga PGOT, peningkatan kualitas layanan psikososial melalui pendamping profesional yang kompeten, serta penyediaan pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja untuk memastikan kemandirian ekonomi pasca hunian. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta, lembaga sosial, dan komunitas lokal perlu diperluas untuk memperkuat sumber daya pendukung dan membuka peluang kerja bagi mantan penghuni Rumah Singgah. Upaya pengurangan stigma sosial di masyarakat juga menjadi faktor pendukung penting yang harus terus didorong melalui edukasi publik dan pendekatan berbasis komunitas. Dengan langkah-langkah tersebut, Program Rumah

Singgah diharapkan dapat semakin efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak sosial yang lebih luas dalam penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amir, F., Hasanah, S., & Purba, H. (2020). Urban poverty and homelessness in Indonesia: A sociological perspective. *Journal of Southeast Asian Studies*, 58(2), 234–251.
- Blanco, C., Garcia, L., & Torres, A. (2021). Social services and housing for vulnerable populations: The role of shelters. *Social Work Research*, 45(3), 185–199.
- DeVerteuil, G., & Sahlin, I. (2019). The dynamics of urban homelessness: Migration, poverty, and social support systems. *European Urban and Regional Studies*, 26(4), 431–445.
- Hill, M., & Varone, F. (2019). *The public policy process*. Routledge.
- Jones, M., & Smith, R. (2021). Housing solutions for the homeless: Global perspectives and local strategies. *International Journal of Housing Policy*, 21(2), 214–229.
- Kusno, A., & Asri, L. (2021). Policy responses to urban homelessness in Indonesian cities. *Journal of Social Policy in Developing Nations*, 34(2), 87–102.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Munro, M., Anderson, B., & Smith, K. (2023). *Urban migration and homelessness: Case studies from*

- Asia and Africa. *Urban Studies Quarterly*, 38(1), 101–120.
- Munro, M., & Thompson, L. (2023). The effectiveness of transitional housing programs in addressing homelessness. *Urban Studies Quarterly*, 38(1), 65–79.
- Mustaqim, R., & Rahmatullah, S. (2023). The role of local governments in addressing homelessness in Indonesian urban areas. *Public Administration Quarterly*, 45(2), 215–237.
- Peters, B. G. (2020). *American public policy: Promise and performance*. CQ Press.
- Pratiwi, A. (2023). The impact of COVID-19 on Indonesia's homeless population. *Journal of Pandemic Studies*, 7(1), 91–102.
- Rahman, F., & Sari, R. (2021). Mental health and homelessness: Barriers and solutions in Indonesian context. *Southeast Asian Journal of Psychology*, 12(3), 175–189.
- Stephens, M., & Ruddick, S. (2022). Economic marginalization and homelessness in small cities: Emerging challenges and responses. *Journal of Urban Marginalization*, 14(2), 56–74.
- Tarsilla, M., & Lundberg, A. (2020). Social integration and homelessness: Approaches to inclusivity. *Social Inclusion Review*, 16(1), 73–92.
- Vedung, E. (2020). *Public policy evaluation*. Transaction Publishers.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Zhou, X., Lin, H., & Gupta, M. (2020). Mental health services and homeless populations: Gaps in developing nations. *International Journal of Public Health*, 15(2), 198–212.
- Sumber Lain :**
- Kemendagri. (2022). *Data statistik penduduk dan pengangguran di Indonesia*. Kementerian Dalam Negeri.
- World Bank. (2020). *The socio-economic challenges of urbanization in Indonesia*. World Bank Reports.